

SKRIPSI

**PERAN AUDITOR INTERNAL DALAM MENCEGAH *FRAUD* DI
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**

RISMAWATI

105730457313



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2017

SKRIPSI
PERAN AUDITOR PEMERINTAH DALAM MENCEGAH *FRAUD* DI
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

RISMAWATI
105730457313

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR

2017

LEMBAR PENGESAHAN

Sikripsi atas nama Rismawati, NIM 105730457313 di terima dan di sahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 125 Tahun 1438 H/2017 M pada Tanggal 16 Juli 2017 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Minggu 16 juli 2017

Makassar, 22 Syawal 1438 H
16 Juli 2017

Panitia ujian

1. Pengawas Umum: Dr.H.Abd. Rahman Rahim SE,MM ()

(Rektor Unismuh Makassar) 

2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.MM (.....)

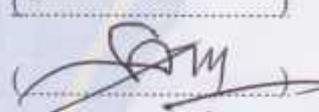
(Dekan Fakultas Ekonomi)

3. Sekertaris : Drs.H. Sultan Sarda,MM (.....)

(Wakil Dek.1 Fak. Ekonomi)

4. Penguji

a. Dr. Agus Salim HR, SE.MM ()

b. Abd. Salam HB, SE, M Si. Ak. CA ()

c. Andi Arman, SE, M Si. Ak. CA ()

d. Samsul Rizal, SE.MM ()

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RISMAWATI
NIM : 105730457313
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Studi : Strata I
Perguruan tinggi : Uninvestitas Muhammadiyah Makassar
Judul proposal : peran auditor pemerintah dalam mencegah *fraud* di
pemerintah Kabupaten Barru

telah di ujiankan sebagai syarat untuk wisuuda pada tanggal 16 Juli 2017

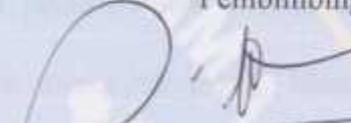
Makassar, 16 Juli 2017

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Mahmud Nuhung, MA
NBM: 497794


Ismail badollahi, SE.M.Si, Ak,CA
NBM: 1073428

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Prodi,


Ismail Kasulung, SE,MM
NBM:90378


Ismail badollahi, SE.M.Si, Ak,CA
NBM: 1073428

ABSTRAK

Rismawati 2017. Peran auditor pemerintah dalam mencegah fraud di pemerintah Kabupaten Barru. Skripsi, jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.pembimbing 1 Dr. H. Mahmud Nuhung, MA dan pembimbing 2 Ismail Badollahi, SE.M.Si,Ak,CA

Dalam menjaga asset asset daerah yang di miliki oleh pemerintah kabupaten Barru dari tidak *fraud* atau kecurangan yang dilakukan oleh beberapa oknum tertentu maka peran auditor sangat berpengaruh baik auditor internal maupun auditor eksternal, karena tindak kecurangan yang terjadi di instansi pemerintah kabupaten Barru mulai terungkap dan dapat di cegah melalui peran-peran auditor.

Penelitian ini bertujuan memahami peran auditor internal dan auditor eksternal pemerintah daerah dalam upaya mencegah *fraud*. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif pada lingkungan pemerintah Kabupaten Barru. Melalui wawancara dengan pengawas/auditor sebagai informan kunci, ditemukan bahwa peran auditor pemerintah daerah mencegah fraud di pemerintah kabupaten Barru yaitu dengan melakukan pemeriksaan serta pengawasan LKPD di pemerintah Kabupaten Barru

=kata kunci : *auditor dan fraud*

ABSTRACT

Rismawati 2017. Peran auditor pemerintah dalam mencegah fraud di pemerintah Kabupaten Barru. essay, majors akuntansi Fakultas Ekonomi University Muhammadiyah Makassar. mentor 1 Dr. H. Mahmud Nuhung, MA dan mentor 2 Ismail Badollahi, SE.M.Si,Ak,CA

In maintaining asset assets owned by local government district of Barru not fraud or fraud committed by some particular elements then the role of auditors are very influential both internal auditors and external auditors, because acts of fraud that occurred in government agencies Barru district began to be revealed and can be Prevented through auditor roles.

This study aims to understand the role of internal auditors and external auditors of local governments in an effort to prevent fraud. The method used is qualitative deskriptif on the government environment Barru District. Through interviews with supervisors / auditors as key informants, it was found that the role of local government auditors prevent fraud in Barru district government by conducting LKPD inspection and supervision at Barru Regency government

= Keyword: *auditor and fraud*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat, Hidayah, dan Taufik Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, sosok pribadi yang agung dan wajib kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Adapun penelitian ini yang berjudul **“Peran auditor pemerintah mencegah *fraud* di pemerintah kabupaten Barru**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun atas karunia-Nya serta bantuan dari berbagai pihak sehingga penulisan karya skripsi ini dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak DR. H. Abd. Rahman Rahim, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail rasulong, SE, MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak.CA, Ketua jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Staff Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Pembimbing II Ismail Badollahi,SE,M.Si,Ak.CA dan Pembimbing I Dr. H. Mahmud Nuhung, SE, MA yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan selama proses penulisan skripsi.
7. Kedua Orang Tua ku tersayang, Ayah dengan semangat yang kokoh tak pernah mengeluh, Ibu yang senantiasa menjadikan sabar sebagai penolong dalam setiap ujian. Kesabaran pasangan ini menjadi cerminan dalam kesaharian kami dalam menempuh pendidikan di tanah rantau ini. Hari ini anak satu-satunya yang kau banggakan ini akan menjadi bintang yang bersinar, Insha Allah.
8. Ucapan terspecial buat sosok laki laki sumber motivasi yang senantiasa mengajak saya menatap masa depan Muh.Nursidik ochta dikalah masa masa sulit dan melelahkan selama proses skripsi

Akhirnya terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga ku peruntukkan kepada seluruh keluarga yang penuh dengan kasih sayang memberikan perhatian kepada penulis hingga dapat menyelesaikan study pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Semoga segala bantuan tulus yang telah menjadi sumbangsi besar dalam proses penyelesaian study ini dapat menjadi amal jariah untuk kita sekalian sehingga mendapat pahala yang terus mengalir, serta dilipat gandakan oleh Allah SWT. Aamiin.

Makassar, 2017

Rismawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRAC	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan teori	7
B. Kerangka berpikir.....	22
C. Hipotesis	22
BAB III PROSEDUR PENELITIAN	
A. Tempat dan waktu penelitian	23
B. Teknik pengumpulan data.....	23
C. Sumber data.....	24

D. Metode analisis data	24
E. Defenisi operasional variable	24
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran umum Kabupten Barru	25
B. Gambaran umum inspektorat	33
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
Hasil dan pembahasan.....	38
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR GAMBAR

1.2 fraud triangel	13
1.3 kerangka pemikiran	22

DAFTAR TABEL

1. daftar nama bupati kabupaten Barru	28
2. daftar nama auditor internal di kabupaten Barru.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuntutan dalam perwujudan *good governance* di Indonesia yang semakin meningkat berimplikasi pada sistem pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan. Hal ini tidak terpisahkan oleh adanya sistem pengendalian dan pengawasan di setiap instansi pemerintah yang secara sistematis terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggung jawaban secara efektif, efisien dan terkendali. Dalam mengefektifkan penyelenggaraan sistem pengendalian, audit internal merupakan satuan pengawas intern dan pembina penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah. Hal tersebut dijelaskan dalam ‘fungsi audit internal’ oleh IIA’S board (2009 dalam Tunggal 2011:4):

Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa audit internal merupakan sendi utama dalam pencapaian tujuan organisasi karena dapat memberikan nilai tambah dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian,

pengendalian dan mampu menghadapi resiko yang potensial dari seluruh kegiatan yang diaudit dalam organisasi serta memastikan apakah organisasi telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Definisi tersebut diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Republik No.60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Aturan tersebut menyatakan bahwa pengendalian intern merupakan seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (http://www.dephut.go.id/files/PP_60_08.pdf:2008). Sementara itu, kedudukan audit internal dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam konteks pengawasan, sejatinya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.79 tahun 2005 tentang Pedoman Dan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ketetapan tersebut menyatakan bahwa pengawasan dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern yaitu inspektorat jenderal departemen, unit pengawasan lembaga pemerintah non departemen, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya. Dengan demikian, secara luas inspektorat daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab sebagai auditor internal yang bekerja dalam pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah. Kemudian, Amrizal (2004) mengemukakan kegiatan-kegiatan utama auditor internal yaitu: (1) mampu menelaah dan menilai kebaikan, memadai

tidaknya penerapan sistem pengendalian manajemen, struktur pengendalian intern dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal; (2) memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana dan prosedur prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen;(3) memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggung jawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan dan penyalahgunaan; (4) memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya; (5) menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen; (6) menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

Dari kegiatan kegiatan tersebut secara garis besar dapat diindikasikan bahwa auditor internal antara lain memiliki peranan dalam: (a) pencegahan kecurangan (*fraud prevention*); (b) pendeteksian kecurangan (*fraud detection*); dan (c) penginvestigasian kecurangan (*fraud investigation*). Dengan demikian audit internal merupakan lembaga yang secara langsung menerima dampak atas pendekatan pencegahan, pendeteksian dan penginvestigasian terhadap kecurangan (*fraud*). Peran dalam penerapan kebijakan *fraud* sangat bervariasi dari satu instansi dengan instansi lainnya, namun terdapat suatu kesepakatan umum bahwa pemilik tanggung jawab kebijakan anti-*fraud* ada pada pimpinan instansi (*tone at the top*) di mana para pimpinan instansi harus membantu memantau dan menegakkan tanggung jawab operasional atas pelaksanaan pengujian dan

penilaian yang dilakukan oleh audit internal. Pengujian dan penilaian risiko yang dilakukan oleh internal audit harus diberikan prioritas yang tinggi, kebutuhan ini akan semakin mendorong dan memacu audit internal untuk meningkatkan kemampuan dan keahliannya. Sejalan dengan pernyataan standar professional audit internal (2004 dalam Tunggal 2012: 13) yang menerangkan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan. Secara teoritis, seluruh gambaran di atas menunjukkan adanya ekspektasi terhadap pengawasan internal pemerintah (inspektorat) yang ketat dan diharapkan mampu mengidentifikasi dan meredam gejala *fraud*. Oleh karenanya, inspektorat memiliki posisi yang sangat strategis, sebagai katalisator dan dinamisator dalam menyukseskan pembangunan daerah yang berkaitan dengan kelancaran jalannya pemerintahan daerah, optimalnya pembangunan, pembinaan aparatur daerah, dan sebagainya. Sehingga inspektorat daerah sebagai pengawas internal dapat menjadi tombak untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi menuju *good governance*. Namun, di sisi lain fakta di Indonesia menunjukkan masih banyak terjadi ketimpangan dalam pengawasan intern khususnya di instansi pemerintahan. Bagi mereka yang berkecimpung di dunia pengawasan (baik internal maupun eksternal), temuan tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru dan mengejutkan. Terlebih oleh kepala instansi, hal tersebut bukan lagi menjadi alasan bahwa kepala instansi tidak mengetahui ataupun tidak menyadari adanya penyimpangan kebijakan ataupun kecurangan di instansinya.

Dengan kata lain terdapat kemungkinan bahwa inspektorat tidak mampu memberikan solusi yang nyata kepada instansi untuk menghentikan atau setidaknya mencegah terjadinya penyimpangan meski telah mampu mengetahui gejala-gejala (*symptoms*) di berbagai kecurangan (*fraud*). Penyimpangan kecurangan (*fraud*) dapat dilakukan baik oleh manajemen puncak maupun pegawai lainnya untuk mendapatkan keuntungan secara tidak beretika dengan cara melakukan tindakan-tindakan criminal seperti korupsi, kolusi, penipuan, dan lain sebagainya (Santoso: 2008, Pambelum: 2008). Praktik korupsi yang telah sejak lama terjadi di Indonesia merupakan salah satu bentuk *fraud* yang paling mencolok di negeri kita. Praktik-praktiknya berupa penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pungutan liar, hingga kolusi dan nepotisme serta pemanfaatan uang negara untuk kepentingan pribadi secara tidak beretika. Ironisnya, meskipun pemerintah berupaya dalam memberantasnya, praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung tanpa ada penurunan pada tingkat persentasenya bahkan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun.

Menurut media pembawah berita online liputan 6.com Sulawesi selatan merupakan salah satu provinsi terbesar yang masuk dalam radar KPK, sebab potensi korupsi di Sulsel terbilang tinggi.

Hal itu di sampaikan wakil ketua KPK, Basaria Panjaitan, usai mengikuti pertemuan dengan perwakilan beberapa LSM di sebuah kafe di bilangan Urip sumiharjo, Makassar, Sulsel, pada Kamis 2 Februari 2017. Termasuk adanya kasus korupsi yang menimpah beberapa bupati di Sulawesi selatan salah satunya kasus korupsi yang menimpah bupati kabupaten Barru bapak Andi Idris Syukur dengan

kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang bersangkutan dengan adanya permintaan mobil pajero sport ke pada perusahaan semen Bosowa untuk memperlancar izin pabrik perusahaan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana peran auditor internal dalam mencegah fraud di Pemerintah Kabupaten Barru ?

C. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan dalam penelitian ini yaitu : untuk mengetahui peran auditor internal dalam mencegah fraud di pemerintah kabupaten Barru.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis, adapun manfaat yang di harapkan antara lain :

a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai peran audit pemerintah dalam mencegah fraud di instansi pemerintahan dengan adanya pemahaman tentang fraud dan pemahaman peran audit dalam mencegah fraud kepada pihak pihak yang bersangkutan maka tindak kecurangan dapat di cegah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan teori

1. Teori peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2009) adalah sebagai berikut: peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat.

Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2005). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut.

Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapanharapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun individu untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalkan dia seorang auditor maka dia harus melakukan pemeriksaan keuangan suatu perusahaan atau instansi pemerintah,

Dalam hubungan dengan penelitian ini peran di artikan berfungsinya auditor (Inspektorat) yang secara sengaja di bentuk oleh pemerintah sebagai auditor yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan laporan keuangan di kabupaten Barru. Dalam hal ini di harapkan inspektorat dapat memberikan keyakinan dalam menangani sistem keuangan dan non keuangan dari hal yang berbau ketidakwajaran di pemerintahan.

2. Auditor Internal

Faktor utama diperlukannya audit internal adalah meluasnya rentang kendali yang dihadapi instansi di pemerintah provinsi yang memilki ribuan pegawai serta mengelola kegiatan yang bervariasi sesuai bidang yang ada. Sehingga, berbagai penyimpangan dan ketidakwajaran dalam menyelenggarakan laporan keuangan daerah ataupun yang bersifat nonkeuangan merupakan potensial masalah nyata yang harus dihadapi.

Untuk mendeteksi dan mencegah berbagai masalah yang ada pada sistem birokrasi pemerintahan maka diperlukan auditor internal untuk melakuka

pengawasan serta pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan pengujian dan pengevaluasian pada kegiatan-kegiatan dalam pemerintahan tersebut.

Perbedaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal Berikut perbedaan auditor internal dan auditor eksternal yang dielaborasi:

a) Perbedaan Misi

Auditor internal memiliki tanggung jawab utama yang tidak terbatas pada pengendalian internal berkaitan dengan tujuan reliabilitas pelaporan keuangan saja, namun juga melakukan evaluasi desain dan implementasi pengendalian internal, manajemen risiko, dan *governance* dalam pemastian pencapaian tujuan organisasi. Selain tujuan pelaporan keuangan, auditor internal juga mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta kepatuhan aktivitas organisasi terhadap ketentuan perundang-undangan dan kontrak, termasuk ketentuan-ketentuan internal organisasi. Sedangkan audit eksternal memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan opini atas kewajaran pelaporan keuangan organisasi, terutama dalam penyajian posisi keuangan dan hasil operasi dalam suatu periode. Mereka juga menilai apakah laporan keuangan organisasi disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum, diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, dan seterusnya. Opini ini akan digunakan para pengguna laporan keuangan, baik di dalam organisasi terlebih di luar organisasi, antara lain untuk melihat seberapa besar tingkat reliabilitas laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi tersebut.

b) Perbedaan Organisasional

Dalam organisasi auditor internal merupakan bagian integral di mana klien utama mereka adalah manajemen dan dewan direksi, serta dewan komisaris, termasuk komite-komite yang ada. Biasanya auditor internal merupakan karyawan organisasi yang bersangkutan. Meskipun dalam perkembangannya pada saat ini dimungkinkan untuk dilakukan *outsourcing* atau *co-sourcing* internal auditor, namun sekurang-kurangnya penanggung jawab aktivitas audit internal (CAE) tetaplah bagian integral dari organisasi. Sementara auditor eksternal sebaliknya, di mana auditor eksternal merupakan pihak ketiga alias bukan bagian dari organisasi. Mereka melakukan penugasan berdasarkan kontrak yang diatur dengan ketentuan perundang-undangan maupun standar profesional yang berlaku untuk auditor eksternal.

c) Perbedaan Pemberlakuan

Secara umum, fungsi audit internal tidak wajib bagi organisasi. Namun demikian, untuk perusahaan yang bergerak di industri tertentu, seperti perbankan, dan juga perusahaan-perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk memiliki auditor internal. Perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN) juga diwajibkan untuk memiliki auditor internal. Sementara itu, pemberlakuan kewajiban untuk dilakukan audit eksternal lebih luas dibandingkan audit internal. Perusahaan-perusahaan yang *listing*, badan-badan sosial, hingga partai politik dalam keadaan-keadaan tertentu diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk dilakukan audit eksternal.

d) Perbedaan fokus dan Orientasi

Auditor internal lebih berorientasi ke masa depan, yaitu kejadian-kejadian yang diperkirakan akan terjadi, baik yang memiliki dampak positif (peluang), maupun dampak negatif (risiko), serta bagaimana organisasi bersiap terhadap segala kemungkinan pencapaian tujuannya. Sedangkan, auditor eksternal berfokus pada akurasi dan bisa dipahaminya kejadian-kejadian historis sebagaimana terefleksikan pada laporan keuangan organisasi.

e) Perbedaan Kualifikasi

Kualifikasi yang diperlukan untuk seorang auditor internal tidak harus seorang akuntan, namun juga teknisi, personil *marketing*, insinyur produksi, serta personil yang memiliki pengetahuan dan pengalaman lainnya tentang operasi organisasi sehingga memenuhi syarat untuk melakukan audit internal. Berbeda dengan auditor eksternal yang harus memiliki kualifikasi akuntan yang mampu memahami dan menilai risiko terjadinya *errors* dan *irregularities*, mendesain audit untuk memberikan keyakinan memadai dalam mendeteksi kesalahan material, serta melaporkan temuan tersebut. Pada kebanyakan negara, termasuk di Indonesia, auditor perusahaan publik harus menjadi anggota badan profesional akuntan yang diakui oleh ketentuan perundang -undangan.

f) Perbedaan *Timing*

Auditor internal melakukan review terhadap aktivitas organisasi secara berkelanjutan. Sedangkan auditor eksternal biasanya melakukan secara periodik/tahunan.

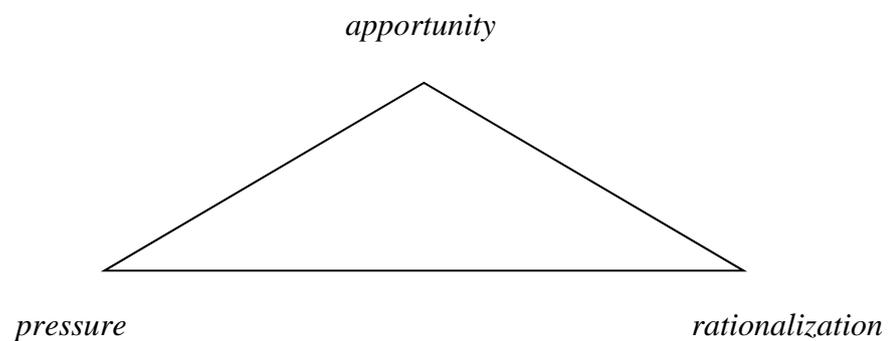
1. Fraud di sektor pemerintahan

Fraud yang paling sering terjadi di sektor pemerintahan adalah korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin, *corruptio-corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Korupsi adalah penyalagunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi menurut UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi, yang termasuk kedalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang di kategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kasus korupsi di instansi pemerintah tidak hanya melibatkan orang- orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga orang orang yang berada di bawahnya serta tidak hanya terjadi dilingkungan pemerintah pusat melainkan juga di lingkungan pemerintah daerah.tindak korupsi yang sering kali di lakukan di antaranya adalah memanipulsi pencatatan, penghilangan dokumen, dan mark- up yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Kecurangan ini biasanya dipicu oleh adanya kesempatan untuk melakukan penyelewengan. Dalam instansi pemerintah sering terjadi kasus penyelewengan aset negara atau aset daerah oleh pihak pihak tertentu. Tindakan tersebut dilakukan semata mata untuk kepentingan pribadi dan sekelompok orang.

3.2. Fraud Triangle

Pertama kali di formulasikan oleh kriminolog Donald Rey Cressey melalui penelitian doktoralnya. Desertasinya di Indiana University berjudul, “ Criminal Violation of Financial Trust” (1950) menganalisa para pelaku penggelapan. Menurut teori fraud triangle cressey (1953) dalam tuanakotta (2007), kecurangan oleh 3 faktor yaitu :



Gambar 1 fraud triangle

1. Tekanan, adalah motivasi dari individu karyawan untuk bertindak fraud dikarenakan adanya tekanan baik keuangan dan non keuangan, tekanan dari pribadi maupun tekanan dari organisasi (kepemimpinan, tugas yang terlalu berat, dll).

2. Peluang, adalah peluang terjadinya fraud akibat lemah atau tidaknya efektifitas kontrol sehingga membuka peluang terjadinya fraud. Disini dimaksudkan adanya faktor penyebab fraud yang di sebabkan adanya kelemahan didalam suatu organisasi antara lain kelemahan sistem, kebijakan, prosedur, proses, dan lainnya yang mengakibatkan seorang karyawan mempunyai kuasa atau

kemampuan untuk memanfaatkan kelemahan yang ada, sehingga iya dapat melakukan perbuatan curang.

3. Pemebenaran, adalah sikap atau proses berpikir dengan pertimbangan moral dari individu karyawan untuk merasionalkan tindakan kecurangan (Rae and Subramanian, 2008). Fraud terjadi karena kondisi nilai-nilai etikalokal yang mendorong (membolehkan) terjadinya fraud. Pertimbangan perilaku kecurangan sebagai konsekuensi dari kesenjangan integritas pribadi karyawan atau penalaran moral yang lain. Rasionalisasi terjadi dalam hal seseorang atau sekelompok orang membangun pembenaran atas kecurangan yang dilakukan. Pelaku fraud biasanya mencari alasan pembenaran bahwa yang dilakukan bukan pencurian atau kecurangan.

3.5 Faktor faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud di instansi pemerintah

Adapun faktor yang mempengaruhi terjadi fraud antara lain :

1. Kesesuaian kompensasi

Kompensasi atau gaji adalah salah satu hal yang penting bagi setiap karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan, karena dengan gaji yang diperoleh seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasibuan (2002) dalam Pramudita (2013) menyatakan bahwa “kompensasi adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti”. Menurut teori Wexley dan Yuki (2003:133) mengatakan bahwa suatu kompensasi yang tidak adil atau tidak memadai serta pekerjaan yang menjemukan dapat mendukung insiden pencurian oleh para pekerja, dalam hal ini adalah pencurian aset perusahaan atau organisasi tersebut.

2. Efektivitas sistem pengendalian interen

Menurut Mulyadi (2008) sistem pengendalian interen adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan yakni kendala pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasi.

Sistem pengendalian internal bagi sebuah organisasi sangatlah penting, yaitu untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Maka semakin baik pengendalian internal didalam suatu instansi akan semakin rendah tingkat terjadinya fraud di sektor pemerintahan.

3. Budaya etis organisasi

Menurut Armstrong (2009) dalam pramudita (2013), budaya organisasi atau budaya perusahaan adalah nilai, norma, keyakinan, sikap dan asumsi yang merupakan bentuk bagaimana orang orang dalam organisasi berperilaku dalam melakukan sesuatu hal yang bisa dilakukan. Nilai adalah apa yang diyakini bagi orang orang dalam berperilaku dalam organisasi. Norma adalah aturan yang tidak tertulis dalam mengatur perilaku seseorang.

Budaya etis organisasi merupakan suatu pola tingkah laku, kepercayaan yang telah menjadi suatu panutan bagi semua anggota organisasi, tingkah laku disini merupakan suatu tingkah laku yang dapat diterima oleh moral dan benar secara hukum, didalam suatu budaya organisasi etis terdapat adanya suatu komitmen dan lingkungan yang etis pula didalam penelitian yang dilakukan Rae dan Subramanian

(2008) menunjukkan bahwa disuatu lingkungan yang etis, seorang karyawan akan lebih cenderung melakukan atau menjalankan peraturan perusahaan atau instansi pemerintahan, dan menghindari perbuatan kecurangan didalam instansi, lingkungan etis ini dapat dinilai dengan adanya budaya etis organisasi dan komitmen organisasi sehingga dapat dikatakan, jika instansi mempunyai budaya etis organisasi yang rendah maka akan mendorong karyawannya untuk melakukan tindakan fraud atau kecurangan.

4. Penelitian terdahulu

Dalam penelitian ini judul yang saya angkat yaitu “ peran audit pemerintah dalam mencegah fraud” sebelumnya ada beberapa peneliti yang juga pernah melakukan penelitian sebelumnya seperti :

Norsain (2014) “peran audit internal dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan (fraud), Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peranan audit internal di PNPM Mandiri Perkotaan dalam deteksi dan pencegahan kecurangan (*fraud*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber datanya. Objek dari penelitian ini adalah PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Kalianget. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian diproses dan dianalisis lebih lanjut serta diambil suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa internal audit yang dilaksanakan pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Kalianget sudah cukup memadai dalam deteksi dan pencegahan kecurangan (*fraud*) dengan struktur pengendalian intern yang baik sebagai *anti-fraud controls* dan deteksi

kecurangan dilakukan melalui prosedur-prosedur audit namun disarankan agar internal auditor PNPM Mandiri Perkotaan di masing-masing desa di Kecamatan Kalianget tidak hanya melakukan pemeriksaan pada Unit Pengelola Keuangan saja namun juga memberikan pemeriksaan pada unit-unit yang lain secara umum yang di kelola oleh BKM masing-masing.

Sri luayyi (2012), “ peran audit internal dalam mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan fraud (studi kasus pada cv.sarana optikal terpadu) Tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa lebih jauh mengenai “Peranan Audit Internal dalam Mencegah dan Mendeteksi Adanya Kecurangan (*Fraud*)”. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber datanya. Data primer yang digunakan berupa data gambaran umum perusahaan, sejarah perkembangan dan struktur organisasi. Sedangkan data skundernya berupa dokumen-dokumen asli dari perusahaan tersebut di atas. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif .

Aditya pramudita (2013) “ analisis fraud disektor pemerintah kota Salatiga “Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi para pegawai pemerintah di instansi pemerintahan mengenai pengaruh gaya kepemimpinan,keefektifan sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, kesesuaian kompensasi, budaya etis organisasi, dan penegakan hukum terhadap kecenderungan terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*. Sampel penelitian ini sejumlah 111 pegawai dinas Kota Salatiga. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Analisis data dalam

penelitian ini menggunakan analisis *full model Structural Equation Modeling (SEM)* dengan alat analisis *smart -PLS*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara gaya kepemimpinan dengan fraud di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif antara keefektifan pengendalian internal dengan *fraud* di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh antara komitmen organisasi dengan *fraud* di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif antara kesesuaian kompensasi dengan fraud di sektor pemerintahan, terdapat pengaruh negatif antara budaya etis organisasi dengan fraud di sektor pemerintahan, tidak terdapat pengaruh antara penegakan hukum dengan *fraud* di sektor pemerintahan

Ni wayan rustiarini dan Ni luh gde novitasari (2014) “ persepsi auditor atas tingkat efektivitas red flags untuk mendeteksi kecurangan” Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi persepsi auditor atas efektifitas *red flags* dalam mendeteksi kecurangan, serta menguji pengaruh faktor-faktor demografis auditor seperti karakteristik (*gender*, posisi pekerjaan, masa kerja), dan kompetensi (pendidikan, pengalaman mendeteksi kecurangan, pelatihan kecurangan) pada persepsi auditor. Penelitian ini dilakukan di Bali dengan melakukan survei pada 84 auditor. Dengan menggunakan regresi linear berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan, pengalaman mendeteksi kecurangan, dan pelatihan kecurangan berpengaruh pada persepsi auditor. Sementara *gender*, posisi pekerjaan, dan masa kerja tidak berpengaruh pada persepsi auditor atas efektivitas *red flags*.

Eko ferry angriawan (2014) “ pengaruh pengalaman kerja, skeptisme profesioanal dan tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi

fraud (studi empiris pada kantor akuntan publik di DIY) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja, skeptisme profesional dan tekanan waktu terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor independen di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berjumlah 133 orang. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner. Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal. Jumlah sampel yang terkumpul adalah 45 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *covenience sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengalaman Kerja berpengaruh positif terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*. 2) Skeptisme Profesional berpengaruh positif terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*. 3) Tekanan Waktu berpengaruh negatif terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*. 4) Pengalaman Kerja, Skeptisme Profesional dan Tekanan Waktu secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi *Fraud*.

Luh putu resti mega artantri, Lilik handajani, Endar pituringsih (2016) “peran E-procurement terhadap pencegahan fraud pada pengadaan barang/jasa pemerintah daerah di pulau lombok” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *e-procurement* terhadap pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa pemerintah daerah di pulau Lombok. Kelompok responden merupakan seluruh anggota kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan anggota Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang berjumlah 108 orang. Penelitian ini dianalisis menggunakan model struktural dengan pendekatan *Partial Least Squares* (PLS). Hasil penelitian ini

mengungkapkan bahwa *e-procurement* memiliki peran untuk menekan *fraud* pada pengadaan barang/jasa pemerintah daerah di Pulau Lombok. *E-procurement* mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pada pengadaan barang/jasa sehingga celah kecurangan dapat dikurangi. Implikasi penelitian ini dapat menegaskan peran penting *e-procurement* sebagai inovasi dalam pengadaan barang/jasa dalam upaya untuk mencegah *fraud* pada pengadaan barang/jasa. Koordinasi lintas sektoral antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum diperlukan untuk mendukung peran *e-procurement* dalam upaya pencegahan *fraud* pada pengadaan barang/jasa.

Yohanes joni pabelum (2008) “pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencegah fraud” penulisan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang dapat dijadikan indikator Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik, Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Implikasinya dalam pencegahan Fraud.

Rita anugerah (2014) “ peran good corporate governance dalam pencegahan fraud” penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang fraud dan corporaten Governanc dalam rangka memperoleh pemahaman yang komperensif mengenai esensi corporate governance dan penerapan mekanisme internal tata kelola perusahaan yang baik dalam usaha mencegah fraud, dan motivasi mengapa orang melakukan *fraud* dapat dijadikan sebagai informasi awal untuk merencanakan aktivitas pencegahan fraud melalui penerapan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Tulisan berikut juga akan membahas arahan Forum *Coporate*

Governance Indonesia (FCGI) mengenai tanggung jawab komite audit dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang dapat diterapkan untuk mengurangi/mencegah *fraud*.

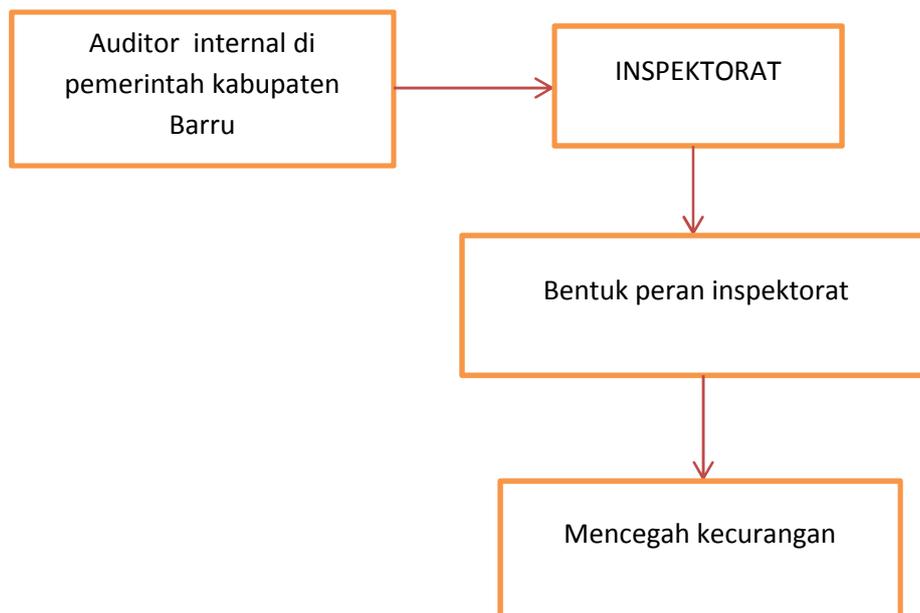
Mimin nur aisyah (2014) “peningkatan peran auditor dalam pencegahan dan pendeteksian *fraud*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran auditor dalam mencegah *fraud* di perusahaan perusahaan besar di dunia dan melakukan analisa yang mendalam dalam pembuatan pedoman yang lebih konferensif untuk mengidentifikasi faktor faktor yang memungkinkan terjadinya kecurangan manajemen. Peningkatan peran auditor terjadi karena adanya tekanan dari masyarakat yang menginginkan pengurangan tindak kecuran

Gartiria hutami (2010) “pengaruh konflik peran dan ambiguitas peran terhadap komitmen independensi auditor internal pemerintah daerah” tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh konflik peran dan ambiguitas peran terhadap komitmen independensi auditor internal pemerintah daerah yang mengambil studi kasus di inspektorat kota semarang, metode penelitian ini menggunakan metode survey yaitu kuesioner. menggunakan sampel auditor yang di peroleh dari data base institute of internal auditors malaysia. Hasil penelitian ini adalah yaitu: 1. Hasil penelitian mendapatkan bahwa konflik peran memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap komitmen independensi. Aparat Inspektorat Kota Semarang yang memiliki konflik peran yang besar cenderung memiliki komitmen independensi yang lebih rendah 2. Hasil penelitian mendapatkan bahwa ambiguitas peran memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap komitmen independensi. Aparat Inspektorat Kota Semarang yang

memiliki ambiguitas peran yang besar cenderung memiliki komitmen independensi yang lebih rendah.

B. KERANGKA BERPIKIR

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:



C. HIPOTESIS

Auditor yang melakukan pemeriksaan di pemerintah kabupaten barru yaitu inspektorat. dengan berfungsinya inspektorat sebagai auditor dengan baik maka tindak kecurangan (*fraud*) dapat dicegah

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan waktu penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti yaitu “peran auditor Internal dalam mencegah fraud di pemerintah Kabupaten Barru” maka untuk memperoleh data, penelitian ini dilakukan di kantor Inspektorat pemerintah Kabupaten Barru. Adapun waktu yang di butuhkan peneliti dalam melakukan penelitian ini untuk mengumpulkan data yaitu selama kurang lebih 2 bulan.

B. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini yaitu proses tanya jawab ataupun diskusi antara peneliti dan informan yang menjadi narasumber. Informan yang dimaksud yaitu yang memungkinkan peneliti memperoleh data berupa informasi yang memadai tentang tujuan penelitian.

1. Studi Dokumentasi

Teknik Dokumentasi, yaitu upaya peneliti dalam mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi dalam Dinas pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kab. Barru. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan

teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

C. Sumber data

Bila dilihat dari keperluan penelitian, sumber data yang di gunakan yaitu :

1. Data primer terdiri dari dokumen dokumen maupun dapat berupa lisan dan juga ada yang tercatat jika langsung dari sumbernya (tentang diri sumber data)
2. Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui studi kepustakaan dan mengkaji buku buku, referensi referensi yang berkaitan dengan judul yang merupakan data pendukung primer.

D. Metode analisis data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Menurut sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang di gunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak di gunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Jadi penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat kalimat penjelasan kualitatif.

E. Defeni operasional

faktor utama diperlukannya audit internal adalah meluasnya rentang kendali yang dihadapi instansi di pemerintah provinsi yang memilki ribuan pegawai serta mengelola kegiatan yang bervariasi sesuai bidang yang ada. Sehingga, berbagai penyimpangan dan ketidakwajaran dalam menyelenggarakan laporan keuangan

daerah ataupun yang bersifat nonkeuangan merupakan potensial masalah nyata yang harus dihadapi. Untuk mencegah berbagai masalah yang ada pada sistem birokrasi pemerintahan maka diperlukan auditor internal untuk melakukan pengawasan serta pembinaan. Dalam hal ini inspektorat sebagai auditor internal memiliki beberapa peran dalam mencegah kecurangan di pemerintah kabupaten

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

a. SEJARAH SINGKAT

1. Gambaran umum kabupaten Barru

1.1. Sejarah singkat kabupaten Barru

Tentang Kabupaten Barru dahulu sebelum terbentuk adalah sebuah kerajaan kecil yang masing - masing dipimpin oleh seorang Raja yaitu : Kerajaan Berru (Barru), Kerajaan Tanete, Kerajaan Soppeng Riaja dan Kerajaan Mallusetasi. Dimasa pemerintahan Belanda dibentuk Pemerintahan Sipil Belanda dimana wilayah Kerajaan Berru, Tanete dan Soppeng Riaja dimasukkan dalam wilayah ONDER AFDELLING BARRU, yang bernaung dibawah AFDELLING PARE PARE sebagai kepala Pemerintahan Onder Afdelling diangkat seorang control Belanda yang berkedudukan di Barru, sedangkan ketiga bekas kerajaan tersebut diberi status sebagai Self Bestuur (Pemerintahan Kerajaan Sendiri) yang mempunyai hak otonom untuk menyelenggarakan Pemerintahan sehari-hari baik terhadap eksekutif maupun dibidang yudikatif. Dari sejarahnya, sebelum menjadi daerah-daerah Swapraja pada permulaan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, keempat wilayah Swapraja ini merupakan 4 bekas Selfbestuur didalam Afdeling Pare-Pare masing-masing:

1. Bekas Selbestuur Mallusetasi yang daerahnya sekarang menjadi kecamatan MalluseTasi dengan Ibu Kota Palanro. Adalah penggabungan bekas-bekas Kerajaan Lili dibawah kekuasaan Kerajaan Ajattapareng oleh Belanda sebagai Selfbestuur, ialah Kerajaan Lili Bojo dan Lili Nepo.

2. Bekas selfbestuur Soppeng Riaja yang merupakan penggabungan 4 Kerajaan Lili dibawah bekas Kerajaan Soppeng (Sekarang Kabupaten Soppeng) Sebagai Satu Selfbestuur, ialah bekas Kerajaan Lili Siddo, Lili Kiru-Kiru, Lili Ajakkang, dan lili Balusu.

3. Bekas Selfbestuur Barru yang sekarang menjadi Kecamatan Barru dengan Ibu Kotanya Sumpang Binangae yang sejak semula memang merupakan suatu bekas kerajaan kecil yang berdiri sendiri.

4. Bekas Selbestuur Tanete dengan pusat Pemerintahannya di Pancana daerahnya sekarang menjadi 3 Kecamatan masing-masing Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Pujananting. Seiring dengan perjalanan waktu, maka pada tanggal 24 Pebruari 1960 merupakan tonggak sejarah yang menandai awal kelahiran Kabupaten Daerah TK.II Barru dengan Ibukota Barru berdasarkan Undang-Undang Nomor 229 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru terbagi dalam 7 Kecamatan dan 54 Desa/Kelurahan. Sebelum dibentuk sebagai suatu Daerah Otonom berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959 pada tahun 1961, Daerah ini terdiri dari 4 Wilayah Swapraja didalam kewedanaan Barru Kabupaten Pare-Pare lama, masing-masing Swapraja Barru Swapraja Tanete, Swapraja Soppeng Riaja dan bekas Swapraja Mallusetasi, Ibu Kota Kabupaten Barru sekarang bertempat di bekas ibu Kota Kewedanaan Barru.

Sejak tahun 1960 Kabupaten Barru telah di pimpin oleh 10 Bupati seperti pada tabel di bawah :

Tabel 2 daftar nama Bupati Kabupaten Barru

No	Nama	Masa jabatan	Keterangan	Wakil Bupati
1	Kapten TNI (Purn.) La Nakka	1960 - 1965		
2	H. Muhammad Sewang	1965 - 1970		
3	Andi sukur	1965 - 1975	Periode pertama	
		1975 - 1980	Periode kedua	
4	Drs. H. Andi pamadengrukka Mappayompa	1980-1985	Periode pertama	
		1985-1990	Periode kedua	
5	H. Andi Makkasau rasak	1990-1995	Periode pertama	
		1995-2000	Periode kedua	
6	H. Andi Muhammad Rum	2000-2005	Periode pertama	
		2005-2010	Periode kedua	H. M Kamrir Dg. Mallongi
7	Ir. H. Andi idris syukur, M.S.	2010-2015	Periode pertama	Drs.H. Andi anwar aksa

8	Andi muh yamin, S.E,M.S	17 Februari – 6 September 2016	Pelaksana tugas (plt.) Bupati	
9	Ir. H. Andi idris syukur, M.S.	17 Feb.- 6 Sep. 2016	Periode kedua	Ir. H. Suardi saleh,M.Si
10	Ir. H. Suardi saleh,M.Si	6 Sep. 2016 - sekarang	Pelaksana tugas (plt.) Bupati	

Kabupaten Barru dikenal dengan motto HIBRIDA (hijaau, bersih, asri,dan indah) adalah salah satu kabupaten yang terleakk di pesisir pantai barat provinsi Sulawesi Selatan dengan garis pantai sekitar 78 Km.

Jumlah SKPD di kabupaten Barru adalah 23 yang mana terdiri dari 14 dinas, 6 badan dan 4 kantor selain itu terdapat inspektorat dan sekda.

a. Dinas

1. Dinas pekerja umum
2. Dinas koperasi, usaha mikro kecil dan menengah,perindustriaan dan perdagangan
3. Dinas pertambangan dan energi
4. Dinas pertanian tanaman pangan dan perkebunan
5. Dinas kehutanan
6. Dinas peternakan
7. Dinas kelautan dan perikanan

8. Dinas pengelolah keuangan daerah
 9. Dinas kebudayaan,pariwisata,pemuda dan olahraga
 10. Dinas perhubungan, komunikasi dan informasi
 11. Dinas informatika dan pencatatan sipil
 12. Dinas kesejahteraan social, tenaga kerja dan transmigrasi
 13. Dinas kesehatan
 14. Dinas pendidikan
- b. Badan
1. Badan perencanaan pembangunan daerah
 2. Badan pemberdayaan masyarakat
 3. Badan penanggulangan bencana daerah
 4. Badan KB dan pemberdayaan perempuan
- c. Kantor
1. Kantor pelaksaasn penyuluhan pertanian,perikanan, dan kehutanan
 2. Kantor perpustakaan,arsip dan dokumentasi
 3. Kantor pelayanan perizinan dan penanaman modal
 4. Kantor lingkungan hidup
- d. Sekertariat daerah
- e. Inspektorat daerah

1.2. Visi dan Misi kabupaten Barru

a. Visi

"Dengan semangat kebersamaan yang bernafaskan keagamaan, kita wujudkan Kabupaten Barru yang maju, sejahtera dan bermartabat" Visi ini

menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Barru tahun 2005 – 2010 dengan penjelasan makna visi sebagai berikut :

- a. Semangat kebersamaan bermakna bahwa upaya membangun Kabupaten Barru perlu dilakukan dengan menggalang semangat kebersamaan dan melibatkan seluruh masyarakat Barru termasuk yang bermukim di luar Kabupaten Barru. Kebersamaan mengandung makna interkoneksi dan mengajak semua pihak untuk bersinergi mewujudkan cita-cita pembangunan.
- b. Bernafaskan keagamaan bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Barru dilakukan dengan mengutamakan nilai-nilai luhur agama, khususnya agama Islam. Maju, sejahtera bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Barru dilakukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Barru yang lebih majudan sejahtera dengan meningkatkan akses informasi, pemanfaatan teknologi maju, serta turut dalam pergaulan nasional dan internasional. Bermartabat berarti bahwa segala langkah yang dilakukan harus berpegang pada nilai-nilai luhur dan budaya masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang madani. Visi Aparat Pemerintahan
- c. Aparat yang mencari Ridho Allah, berarti bahwa semua aparat dan masyarakat selalu berorientasi untuk mendapatkan ridho Allah dalam melakukan pekerjaan sehingga produktivitas SDM semakin baik dan penyalahgunaan wewenang, perselisihan dan penekanan terhadap golongan yang lemah tidak terjadi lagi. Semuanya saling mendukung, saling membantu dan saling menguntungkan.
- d. Aparat pemerintah melakukan yang terbaik, berarti bahwa aparat mencapai keberhasilan dan berusaha melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan setiap pekerjaan atau amanah yang diembannya dan

prinsip yang dapat dipegang adalah melakukan yang terbaik pada setiap pekerjaan, dan bekerja hari ini, hidup ditentukan oleh hari ini sehingga dengan prinsip tersebut semua akan melakukan tugas dan tanggung jawab yang terbaik untuk hari ini, berusaha menyelesaikan seluruh pekerjaan hari ini, dan melakukan pengabdian yang terbaik hari ini. Dengan demikian, aparat pemerintahan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan masyarakat yang merasa terlayani akan mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan. Komitmen yang bulat dari seluruh masyarakat Barru menjadi sumber semangat untuk bangkit menjadi masyarakat maju, sejahtera dan bermartabat, berkurangnya korupsi, kolusi dan nepotisme, dan pemanfaatan sumberdaya menjadi optimal. Kedua visi aparat tersebut, baik mencari ridho Allah maupun melakukan yang terbaik dapat menyatu dalam pepatah bugis Resopa Temmangingingi namalomo naletei pammase dewata artinya bekerja terus menerus tanpa pamrih akan mendapat ridho Allah.

b. Misi

Berdasarkan visi tersebut di atas, maka dirumuskan misi sebagai berikut: Meningkatkan pengamalan Pancasila dan ajaran agama secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1. Menciptakan lingkungan yang kondusif (aman, tertib dan nyaman) yang mendorong investasi dan peningkatan pendayagunaan sumberdaya pembangunan.

2. Menciptakan interkoneksi dengan wilayah lain dan kemitraan yang sinergis/saling menguntungkan antar pelaku ekonomi dan dunia usaha dengan prinsip kesetaraan sebagai perwujudan demokratisasi ekonomi.
3. Meningkatkan peran aparatur sebagai pelayan kepentingan masyarakat, motivator, dinamisator dan aktivator untuk membangkitkan semangat dan peran serta masyarakat sebagai aktor pembangunan.

2. Gambaran umum inspektorat kabupaten barru

2.1. Peraturan perUU tentang terbentuknya inspektorat

Penerapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Sebagai lembaga pengawasan Inspektorat Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur. Perubahan pertama berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, termasuk didalamnya instansi pengawasan yang dikenal dengan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda).

Perubahan Kedua Perda Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten. Perubahan ke tiga Perda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru Inspektorat sebagai lembaga pengawasan Internal dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi didukung oleh 35 personil yang terdiri dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Auditor (PFA),

2.2. Visi dan Misi

a. Visi

1. Pemerintahan yang Baik mengandung makna bahwa Inspektorat memiliki kewajiban moral sebagai lembaga pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Barru untuk berada di garis depan perwujudan good governance dengan bersikap pro aktif dan terpercaya dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik, dengan memperhatikan prinsip-prinsip accountability, equity, effectiveness dan efficiency, responsiveness serta transparency.

2. Pengawasan Profesional mengandung makna bahwa setiap aparat pengawasan akan selalu meningkatkan kemampuannya dan dalam setiap pelaksanaan tugas senantiasa melakukannya dengan suatu landasan metodologi, sikap kerja yang berintegritas secara moral dan profesi dan senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi satuan kerja/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.

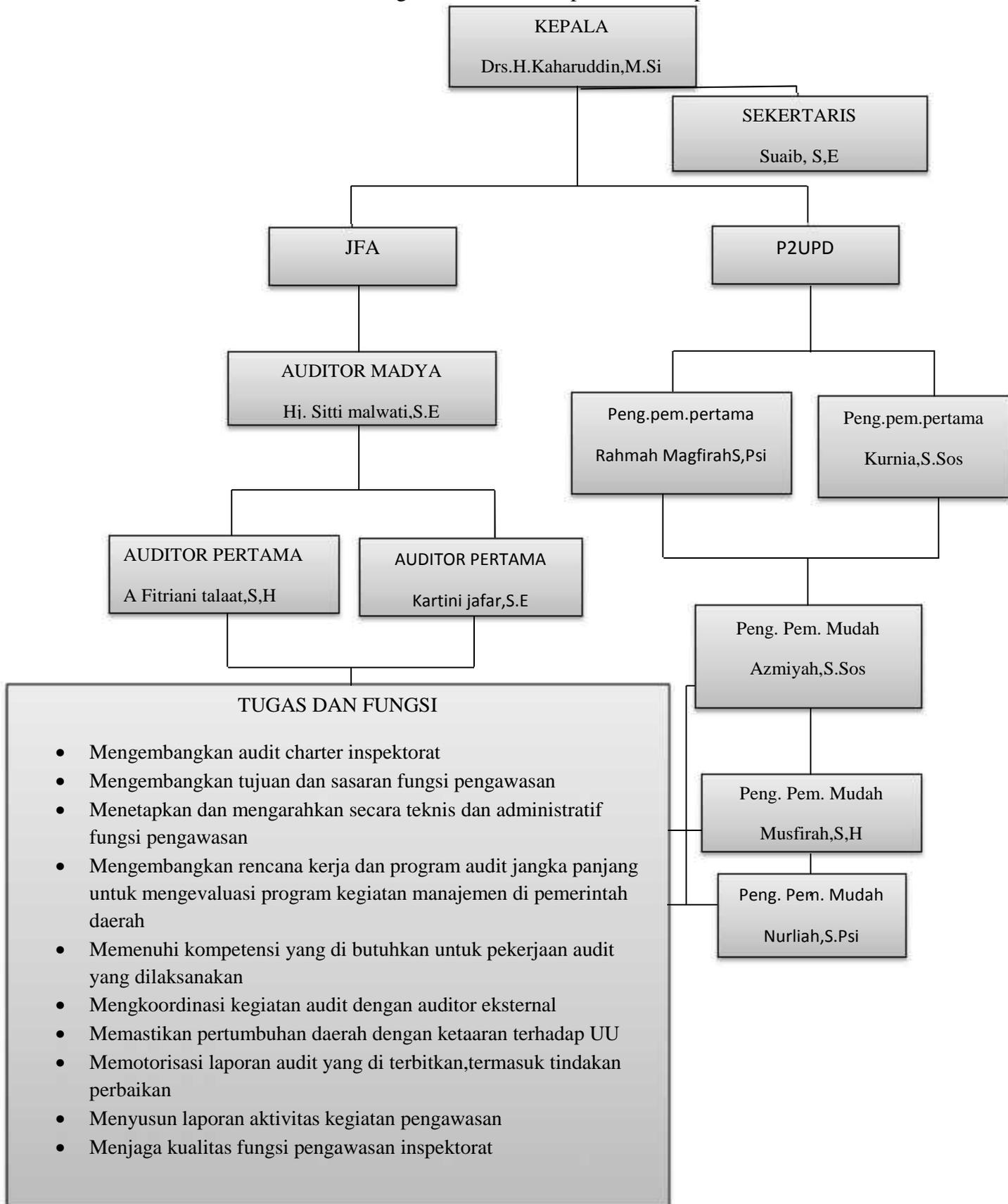
3. Taat Azas mengandung makna seluruh kegiatan yang dilakukan mengacu pada ketentuan agama, hukum dan budaya/adat istiadat.

b. Misi

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Meningkatkan kinerja instansi Pemerintah

Gambar 1.5 struktur organisasi auditor inspektorat kabupaten Barru



Wawancara yang dilakukan dengan Hj. Sitti malwati,S.E selaku auditor madya menyatakan:

“ jika berbicara mengenai auditor pemerintah dalam upaya pencegahan fraud (kecurangan di pemerintah Kabupaten Barru itu berarti berbicara tentang auditor di inspektorat, inspektorat melakukan pemeriksaan laporan keuangan daerah seperti halnya BPK namun auditor inspektorat sebelum melakukan pemeriksaan dilakukan pendampingan dulu dan pengawasan biasanya menerima konsultasi dari pihak pihak kantor pemerintah dan desa desa diwilayah kabupaten Barru agar tetap berada pada jalan dan sesuai koridornya masing masing”

Inspektorat Daerah Kabupaten Barru adalah Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan, yang tugas pokoknya melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pengawasan, terutama mengenai perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengawasan, pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan dan Pembinaan terhadap seluruh perangkat Inspektorat yang profesional sehingga terciptanya kesatuan gerak langkah yang harmonis dalam melaksanakan seluruh kegiatan Pemerintah Daerah.

Eksistensi dari institusi Inspektorat sesuai visinya adalah mewujudkan pemerintahan yang baik, pengawasan yang profesional dan taat azas yang diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahunan dengan 3 (tiga) sasaran dan 7 (tujuh) indikator .Realisasi terhadap sasaran yang sudah ditetapkan secara umum sasaran telah tercapai, melalui tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Barru dalam bentuk masukan dan arahan yang berguna bagi tercapainya tingkat pelayanan yang baik di Bidang Pengawasan terhadap kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.

Indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adalah adanya suatu tingkat kepuasan baik pada Pemerintah maupun masyarakat, namun keberhasilan pelaksanaan tugas yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2016 – 2017 telah dapat dilihat pada pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam renstra tersebut. Pada tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Barru merencanakan 3 (tiga) sasaran, yaitu :

1. Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
2. Terciptanya pelayanan publik yang prima
3. Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur

Program kerja inspektorat pemerintah kabupaten Barru tahun 2016-2017 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang kegiatannya meliputi :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Makan dan Minuman Harian

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan yang kegiatannya meliputi :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Laporan Semesteran

- Penyusunan Laporan Akhir Tahun
- Penyusunan RKA dan DPA

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang kegiatannya meliputi :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rencana Strategis 2016-2017
Inspektorat Daerah Kab.Barru 3
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
- Penyediaan Makan dan Minuman Tamu/Rapat
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang kegiatannya meliputi :

- Monitoring dan Evaluasi

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang kegiatannya meliputi :

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Mebeleur
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler

6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yang kegiatannya meliputi :

Rencana Strategis 2016-2017 Inspektorat Daerah Kab.Barru 31

- Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
- Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda

7. Program Mengintensipkan Penanganan Pengaduan Masyarakat yang kegiatannya meliputi :

- Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH yang kegiatannya meliputi :

- Inventarisasi Temuan Pengawasan
- Tindak Lanjut Temuan
- Koordinasi Pengawasan yan lebih Komprehensif

9. Program Peningkatan Pelayanan Publik yang kegiatannya meliputi :

- Penyusunan Standar Pelayanan

10. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang kegiatannya meliputi

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan

11. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang kegiatannya meliputi :

- Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Rencana Strategis 2016-2017 Inspektorat Daerah Kab.Barru 32
- Pelatihan Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.

Dalam mewujudkan pemerintah yang baik terbebas dari tindakan fraud maka inspektorat berperan sebagai auditor internal di pemerintah kabupaten Barru dengan tidak terlepas dari program rencana kerja pemerintah kabupaten Barru sesuai dengan pernyataan Wawancara yang dilakukan dengan Hj. Sitti malwati,S.E selaku auditor madya menyatakan:

“ jika berbicara mengenai auditor dalam upaya pencegahan fraud (kecurangan di pemerintah Kabupaten Barru itu berarti berbicara tentang auditor di inspektorat, inspektorat melakukan pemeriksaan laporan keuangan daerah seperti halnya BPK namun auditor inspektorat sebelum melakukan pemeriksaan dilakukan pendampingan dulu dan pengawasan biasanya menerima konsultasi dari pihak pihak kantor pemerintah dan desa desa diwilayah kabupaten Barru agar tetap berada pada jalan dan sesuai koridornya masing masing”

dalam hal ini inspektorat sebagai lembaga yang mewadai unsur pembinaan aparat pemerintah melakukan tindakan preventif dengan menciptakan hubungan yang bersifat memfasilitasi,konsultatif, mitra bagi pemerintah daerah dalam upaya pencegahan fraud di pemerintahan daerah.

Untuk itu adapun peran inspektorat dalam mencegah fraud dipemerintah Kabupaten Baru sebagai berikut :

1. Berperan sebagai Pemeriksa terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Barru mulai dari perencanaan hingga hasil pelaksanaan

Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara teratur berdasarkan rencana yang telah di tetapkan minimal 1 tahun sekali terhadap

penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dengan cara membandingkan antara peraturan / rencana / program dengan kondisi dan kenyataan yang ada. Selama kurung waktu januari-Desember 2017, inspektorat telah melakukan pemeriksaan berkala terhadap 7 kecamatan 52 desa dan 47 Organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintahan kabuapten Barru,

Pemeriksaan kaji uji fisik merupakan salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan pelaksanaan kegiatan fisik dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah, dokumen, standar harga, dan atau barang yang telah ditetapkan. Pemeriksaan kajian khusus digunakan pada kegiatan pembangunan jembatan, jalan, irigasi, dan gedung. Dalam kurung waktu januari-desember 2017 inspektorat telah melaksanakan pemeriksaan fisik yang terhadap 268 kegiatan fisik yang terbagi dalam 3 putaran periode pemeriksaan. Putaran pertama dilaksanakan pada tanggal 20-29 januari 2017, putaran kedua tanggal 8-15 juni 2017 dan putaran ketiga pada tanggal 24 november sd 4 desember 2017 dengan rincian objek pemeriksaan sebagai berikut :

OPD	Jumlah kegiatan kaji uji
Dinas pekerja umum	3
Dinas koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustriaan dan perdagangan	2
Dinas pertambangan dan energi	2
Dinas pertanian tanaman pangan dan	3

perkebunan	
Dinas kehutanan	2
Dinas pengelola keuangan daerah	2
Dinas kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga	3
Dinas kesehatan	2
Dinas pendidikan	2
Dinas informatika dan pencatatan sipil	2
Dinas perhubungan, komunikasi dan informasi	3
Badan penanggulangan bencana daerah	2
Badan perencanaan pembangunan daerah	3
Badan pemberdayaan masyarakat	3
Badan KB dan pemberdayaan perempuan	3

Dari tabel di atas menunjukkan jumlah kegiatan kaji uji pemeriksaan terhadap beberapa OPD di pemerintah kabupaten sebanyak 37 kegiatan yang di lakukan selama 1 tahun. Dari kegiatan pengawasan tersebut di lakukan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sebagai upaya rekomendasi yang tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan internal (INSPEK TORAT kabupaten barru) maupun pemeriksaan eksternal (BPK) dari proses penyelesaian tindak lanjut tersebut maka dapat dilihat komitmen pimpinan

SKPD terhadap hasil pemeriksaan dan arti pentingnya kegiatan pemeriksaan bagi pencegahan fraud. Disamping itu, dengan adanya batasan waktu penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK yaitu 60 hari kerja setelah LHP diterima, maka perlu dilakukan koordinasi intensif dalam rangka penanganan dan penyelesaian tindak lanjut tersebut sehingga bisa diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.

2. Berperan sebagai pemeriksa terhadap pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat sangat di harapkan dalam membantu pihak auditor mencegah fraud di instansi pemerintahan dengan adanya pengaduan masyarakat maka pihak auditor mampu mendapatkan informasi mengenai tindak kecurangan. Adapun sop pengaduan masyarakat mengenai pengawasan di inspektorat yaitu tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan dengan menanggapi secara tertulis dan melakukan audit dengan tujuan tertentu atau audit investigasi. Pengaduan tindak lanjut akan di adakan paling lama 90 hari sejak pengaduan melewati proses penelaan dan di terima oleh bagian tata usaha inspektorat.

Adapun kasus pengaduan masyarakat yang di lakukan audit investigasi di kabupaten Barru yaitu pengaduan masyarakat mengenai kasus korupsi bupati kabupaten Barru setelah dilakukan audit insvestigasi dari pengaduan masyarakat bupati barru di jerat pasal 12 huruf e UU pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dengan contoh kasus seperti ini membuktikan bahwa inspektorat berperan menangani tindak kecurangan dari adanya pengaduan masyarakat, untuk itu dalam mencegah fraud di pemerintah kabupaten barru inspektorat harus memiliki

peran ini dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan pengaduan masyarakat sehingga menjadikan kabupaten Barru menjadi pemerintah yang bersih.

3. Berperan mereviu laporan keuangan pemerintah kabupaten Barru

Inspektorat berperan dalam melakukan rivi u terhadap laporan keuangan dengan cara memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum. Memberikan pernyataan tentang kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Melaporkan hasil Reviu dengan data yang memadai dan memberikan masukan kepada pimpinan dan bagian terkait agar dapat dilakukan perbaikan.

4. Berperan melakukan pendampingan

Inspektorat melakukan pendampingan kepada aparatur pemerintah di kabupaten Barru termasuk melakukan pendampingan terhadap desa desa yang ada di kabupaten Barru, pendampingan itu berupa pendampingan mengenai pelaksanaan, pemeriksaan dan pel;aporan pembangunan desa. Pembekalan yang dilakukan guna mensinergikan potensi pendampingan desa dengan tujuan untuk keberlangsungan pelaksanaan pemerintah yang bersih dari Fraud yang di atur dalam peraturan menteri dalam negri no 71/2015 tentang kebijakan pengawasan di lingkungan kementerian dalam negri dan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2016.

Wawancara dengan pak Drs.H.Kaharuddin,M.Si selaku kepala atau inspektur di inspektorat kabupaten Barru mengatakan :

“ kita sengaja mendorong teman teman pendamping titik kritis yang bisa menjadi temuan dalam pengelolaan APBDes.sehingga mereka berperan dalam memberikan masukan ke pemdes agar kebiasaan penyimpanan dan kebocoran penegelolaan anggaran bisa di cegah”

Adapun titik kritis penyalagunaan keuangan desa sebagai berikut :

No	Titik kritis
1	Sikus pengelolaan keuangan di pemerintah kabupaten barru belum sepenuhnya di patuhi oleh pemerintah termasuk di lingkungan desa
2	SDM pengelolah keuangan desa belum memahami peraturan terkaid pengelolaan asset desa
3	Transparasi rencana penggunaan dan pertanggung jawaban APBDesa
4	Komponen dan partisipasi sawadaya dan gotong royopng masyarakat atas pembanguna desa belum di akomodir dalam APBdesa
5	Keuanga desa di pegang sepenuhnya oleh kepala desa, bendahara desa tidak diperanklan sesuai tugasnya

Dari titik kritis di atas dalam mencegah fraud di pemerintah kabupaten barru maka inspektorat pemerintah kabupaten barru melakukan pendampingan kepada aparatur desa mengenai peran peran aparatur desa agar melakukan perannya sesuai dengan peraturan yang di tetapkan yaitu peraturan pemerintah kabupaten Barru tentang nomor 12 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan desa dan UU nomor 6 tahun 2014 tebtabgh keuangan desa

5. Peningkatan SDM aparatur pengawasan

Auditor internal merupakan unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi. Auditor internal terdiri dari Inspektorat Jendral Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/ Kota (Itwilkab/Itwilkot), dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sedangkan auditor eksternal adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang merupakan lembaga pemeriksa yang independen. Auditor eksternal sendiri merupakan unit pemeriksa yang berada di luar organisasi yang diperiksa (Mardiasmo, 2002).

Selanjutnya sesuai pasal 12 PP No 41 Tahun 2007 disebutkan bahwa kegiatan pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota. Selanjutnya mengacu pada amanat PP tersebut, Pemerintah Kabupaten Nunukan telah membentuk lembaga perangkat daerah yang disebut Inspektorat yang pedoman teknis organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Inspektorat Kabupaten Barru adalah Aparat Pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Hal ini berarti kegiatan pengawasan yang dilakukan bersifat internal yakni pemeriksaan kegiatan atau urusan pemerintahan daerah yang pembiayaannya berasal dari APBD Kabupaten Barru. Hasil pengawasan dan pemeriksaan (Audit) Inspektorat di pertanggung jawabkan kepada Bupati untuk keperluan pembinaan dan pengendalian internal urusan pemerintahan daerah kabupaten. Sebagai institusi resmi yang diberi otoritas di

bidang pengawasan dan pemeriksaan (audit) keuangan daerah, Inspektorat memiliki peranan yang sangat penting untuk mengawal proses pemerintahan dan pembangunan agar tetap berada dalam bingkai aturan yang benar (on the right track), semakin baik proses audit dan tindak lanjutnya maka kinerja inspektorat semakin baik pula. Selanjutnya kinerja inspektorat yang baik akan memberi kontribusi penting pada terwujudnya pemerintahan daerah yang baik dan bersih (good and clean governance) sebagai amanat rakyat

Salah satu instrument penting dalam membenahan sistem pemanfaatan dan penatausahaan keuangan daerah adalah pengendalian dan pengawasan. Pengendalian berfungsi mencegah penyimpangan dan mengendalikan pemanfaatan anggaran pemerintah daerah. Peningkatan kinerja pengawasan akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang ada di daerah. Dalam jangka panjang, wacana good and clean governances tidak bisa tidak, harus melibatkan semua unsur dan stakeholder yang ada di daerah sebab keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam membangun dan mensejahterakan masyarakat tapi juga bagaimana pelaksanaan kebijakan itu, diawasi dan di kendalikan dalam kerangka good and clean governances. Kinerja inspektorat sebagai institusi pengawasan akan sangat mewarnai proses pencitraan good and clean governances di kabupaten Nunukan. Semakin baik kinerja yang ditunjukkan oleh inspektorat maka semakin cepat pula terwujudnya good and ceal governances, sebaliknya melempemnya kinerja inspektorat akan semakin membuat cita-cita tersebut makin jauh dari kenyataan.

karena itu kedepan masalah peningkatan kuantitas dan kualitas SDM menjadi isu yang sangat penting dalam rangka peningkatan kinerja inspektorat kearah yang lebih baik.

Faktor SDM menjadi kunci mengingat keberhasilan pelaksanaan tugas sangat ditentukan oleh profesionalisme, kompetensi dan moral aparatur pengawasan/auditor. Dalam batas-batas tertentu, sistem pengawasan masih bisa berjalan meskipun dengan dana, sarana serta aksesibilitas wilayah rendah, asal ditunjang oleh faktor SDM yang baik. Keterbatasan sarana dan prasarana masih bisa ditutupi oleh profesionalisme, kompetensi dan moral aparatur pengawasan. Sebaliknya sebanyak berapa pun biaya, selengkap apapun sarana dan semudah apapun akses wilayah kalau tidak didukung oleh SDM yang memadai dan kompeten, maka pelaksanaan tugas pokok tersebut akan tersendat dan tidak bisa berjalan secara efektif. Jumlah tenaga auditor haruslah cukup dan seimbang dengan jumlah obrik atau auditan. Begitupun kemampuan profesionalisme dan kompetensi masing-masing haruslah proporsional dengan kebutuhan pengawasan saat ini dan masa mendatang. inspektorat diisi oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dasar pengawasan dan kompetensi keilmuan tertentu sehingga inspektorat sebagai lembaga akan selalu memiliki kemampuan penyesuaian dengan tantangan dan modus kasus penyimpangan yang semakin canggih. Peningkatan SDM merupakan satu solusi bijak dalam upaya peningkatan kinerja inspektorat sebagai institusi pengawasan menuju era pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) di Kabupaten Barru.

Adapun daftar nama auditor di inspektorat Kabupaten Barru :

Tabel 3 daftar nama auditor di inspektorat kabupaten Barru

No	Nama/Nip	Jabatan	keterangan
1	Hj. Sitti malwati,S.E	Auditor madya	JFA
	19641231990122002		
2	Azmiyah, S.Sos	Pengawas pemerintah muda	P2UPD
	197303081993032004		
3	Musfirah, S.H	Pengawas pemerintah muda	P2UPD
	197303081993032004		
4	Nurliah,S.Psi	Pengawas pemerintah muda	P2UPD
	198309022008032001		
5	Rahmah maghfirah,S.Psi	Pengawas pemerintah muda	P2UPD
	198307012008032002		
6	Kurnia,S.sos	Pengawas pemerintah muda	P2UPD
	197311191998032006		
7	A Fitriani talaat,S.H	Auditor pertama	JFA
	198605282011012026		
8	Kartini Jafar,S.E	Auditor pertama	JFA
	197704252011012005		
9	Idris,ST.	Auditorpelaksana lanjutan	JFA
	197203212010011005		

JFA=jabatan fungsional auditor

P2UPD=pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

Dari tabel nama auditor di atas dapat disimpulkan bahwa auditor di inspektorat merupakan orang-orang yang memiliki kinerja baik karena dapat dilihat latar belakang pendidikan yang dimiliki sebagian besar berasal dari jenjang pendidikan yang layak untuk menjadi auditor

selain penjelasan dari Hj. Sitti Malwati, S.E mengenai peran auditor di inspektorat kemudian ditambahkan pernyataan oleh bapak Idris, ST. mengatakan

:“ bahwa auditor di inspektorat kabupaten Barru selalu melakukan kegiatan kunjungan ke desa-desa, instansi pemerintahan, sekolah, dinas, kecamatan, dan badan yang ada di kabupaten Barru untuk memberikan pengawasan dan pemahaman mengenai tindak kecurangan katanya kalau untuk mencegah kecurangan untuk mengawasi sekedar laporan keuangan saja itu tidak cukup tapi perlu pengawasan lebih mendalam ke pihak-pihak yang bersangkutan dan memberikan pemahaman yang cukup”.

dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa auditor internal dalam menjalankan perannya, lebih terfokus pada pemberian arahan-arahan terkait dengan topik pemeriksaan yang dilakukan. Auditor memberikan koreksi atas kekeliruan pencatatan dan memberi pembinaan pada semua unit yang menjadi bagian dari pemerintahan daerah. apabila ada hal yang perlu mendapat perbaikan, maka auditor internal memberi kesempatan pada *auditee* untuk segera memperbaikinya, dan auditor internal tidak langsung mengeksekusi terhadap tindakan kecurangan melainkan melakukan pengawasan, melayani konsultasi dengan memberikan penyelesaian tentang permasalahan di tingkat kabupaten dan desa seperti memberikan penjelasan dan gambaran mengenai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan desa, serta memfasilitasi semua kegiatan kegiatan dalam mewujudkan *good government* di kabupaten Barru dalam upaya mencegah terjadinya fraud.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Auditor dalam menjalankan perannya, lebih terfokus pada pemberian arahan-arahan terkait dengan topik pemeriksaan yang dilakukan. Memberikan pembinaan pada semua unit yang menjadi bagian dari pemerintahan daerah. Apabila ada hal-hal yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan, maka auditor mampu memberikan solusi atau saran-saran perbaikan kepada auditee. Dalam konteks penelitian ini, membahas tentang peran auditor dalam mencegah fraud di pemerintah kabupaten Barru. Peran mereka yang tidak hanya sekedar sebagai pemeriksa melainkan juga sebagai pengawas. Jika seorang auditor berperan sebagai pengawas, maka dia harus mengawasi dengan baik apa yang dilakukan oleh aparat pemerintah di daerah, dan bagaimana mereka melakukan kegiatannya. Ada pun peran inspektorat dalam mencegah fraud sebagai berikut:

1. Pemeriksaan secara regular
2. Pemeriksaan terhadap pengaduan masyarakat
3. Reviu terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten Barru
4. Pendampingan terhadap aparat desa
5. Peningkatan SDM aparatur pengawasan

B. SARAN

saran penulis yaitu agar inspektorat benar benar memahami perannya dengan baik sebagai auditor internal meskipun kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang di lakukan sudah sesuai dengan peraturan per Undang-undangan karena pemerintah yang bersih dari tindak kecuragan berpatokan pada pihak pengawas dan pemeriksa yang berada dalam lingkup pemerintahannya, sehingga dengan pemahaman peran kiranya inspektorat lebih berperan lagi dalam melakukan pencegahan fraud

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya pramudita, 2013, *Analisis faktor faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan akuntansi: studi kasus pada perusahaan publik dan badan usaha milik negara di indonesia*, universitas Ganesha. Darma, prawira
- Agoes, Soekrisno (2009). *Auditing* jakarta : Salemba
- Achmed, Yan. 2012. *Audit Internal*. blogspot.com/2012/04/auditor.html (Diakses: 24 Mei 2013)
- Ahmad, Z., dan D. Taylor. 2009. "Commitment to Independence by Internal Auditor: The Effects of Role Ambiguity and Role Conflict." *Managerial Auditing Journal*, Vol. 24, No. 9, pp. 899-925.
- Arens, A.A., dan J.K. Loebbecke. 2006. "Auditing: Pendekatan Terpadu, Adaptasi oleh Amir Abadi Jusuf." Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat.
- Albrecht, W Steve, Albrecht, Connan C & Albrecht, Chad O. 2006. *Fraud Examination*. Canada. Thomson South-Western
- Anugerah, Rita. 2012. "Good Corporate Governance": Peranan Komite Audit Dalam Mewujudkan Kredibilitas dan Objektivitas Laporan Keuangan Perusahaan. Minda Emas Dosen Perempuan (Sempena 50 Tahun Universitas Riau) hal 225-234.
- Arens, Alvin A. 2008. *Auditing dan Jasa Asurance Pendekatan Terintegrasi Jilid I*. Erlangga. Jakarta.
- BPKP. 2008. "Modul Diklat Peningkatan Kemampuan APFP Provinsi DI Yogyakarta." Unit Pengelola Pendidikan dan Latihan Pengawasan Perwakilan BPKP DI Yogyakarta
- Mulyadi 2006. *Auditing*. Yogyakarta:salemba empat.
- pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan 2008, *fraud auditing*. Edisi ke lima. Bogor: pusklatwas BPKP

Soekanto,soerjono .(2009). *Teori peran*. Jakarta. Bumi aksaraSugiyono, 2014.

Memahami penelkitian kualitatif. Bandung: Alfabeta

Tuanakotta,edisi 2, *akuntansi forensik dan audit investigatif*. Jakarta: Saalemba

empat.

[Http://catatankecil-indri.blogspot.com/2014/02/bpk](http://catatankecil-indri.blogspot.com/2014/02/bpk)

[Http://narto-calon legislator.blogspot.com](http://narto-calon legislator.blogspot.com)

RIWAYAT HIDUP



Rismawati, dilahirkan di Barru Kabupaten Barru pada tanggal 09 Mei 1995, merupakan anak tunggal dari pasangan ayahanda Usman dan ibunda Suriati. Penulis masuk sekolah dasar pada tahun 2001-2002 di SDN center ele dan tamat tahun 2006-2007, tamat SMP Negeri 2 Tanete Riaja tahun 2009-2010, dan tamat SMK Negeri 1 Barru 2012-2013. Pada tahu yang sama penulis melanjutkan pendidikan pada program sarjana (S1) program studi akuntansi Fakultas ekonomi universitas mhammadiyah Makassar.